

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN SISTEM AGROFORESTRI DI KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Taufik Alhabsyi ¹⁾, Irwan Bempah ²⁾, Wawan K Tolinggi ²⁾

¹⁾Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128

²⁾Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128

ABSTRACT

This research aims at determining the local government policies regarding land use of agroforestry system in Suwawa Selatan Sub-district, Bone Bolango Regency as well as its implementation. This study applied a content analysis method supported by the Guttman scale. The results reveal that: (1) Bone Bolango Regency has several programs and policies regarding land use of agroforestry system issued by four agencies or government institutions, namely: Department of Animal Husbandry and Agriculture of Bone Bolango, Bone Bolango Law Department, Bone Bolango Watershed Management, and Department of Environment and forests of Gorontalo Province. In addition, there are eighteen programs total, consisting of nine programs related to agroforestry systems and nine programs of agroforestry systems. (2) the implementation of agroforestry program and policies in the research area at a scale ranging from 50%-100% categorized successful; it is proven from their implementation elements, namely program and policies (69.71%), institutions or organizations (73.14%), and utilization of farmers and farmers (96.00%). The program and policies run by farmers in Suwawa Selatan Sub-District are program originating from the Department of Environment and forests of the Gorontalo Province.

Keyword : *Analysis Of Implementasi, Government Policy, Agroforestry System.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kebijakan pemerintah daerah mengenai penggunaan lahan sistem agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah yang telah di buat mengenai penggunaan lahan dengan sistem agriforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan Analisis Isi atau Content Analysis di dukung oleh Skala Guttman. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Kabupaten Bone Bolango memiliki program dan kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang di keluarkan oleh 4 instansi atau lembaga pemerintah yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Pertanian Bone Bolango, Bagian Hukum Bone Bolango, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Program dan kebijakan berjumlah 18 yang terdiri dari 9 program dan kebijakan yang secara langsung terkait dengan agroforestri dan 9 program dan kebijakan yang secara tidak langsung terkait dengan sistem agroforestri. (2) Implementasi program dan kebijakan Agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan berada pada kategori berhasil dilihat dari 3 elemen implementasi yakni program dan kebijakan sebanyak 69,71%, lembaga atau organisasi 73,14%, dan pemanfaatan atau petani 96,00% yang berada pada rentang skala 50%-100% dengan kategori berhasil. Program dan kebijakan yang di jalankan petani di Kecamatan Suwawa Selatan adalah program yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci: Analisis Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Sistem Agroforestri

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan mencapai 1,2%. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, pada Tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia tanpa diiringi dengan usaha peningkatan perekonomian menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah. Diantara permasalahan yang muncul yaitu dari sektor

pertanian dimana terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Jika alih fungsi lahan tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang dapat menciptakan bencana sosial (Kaputra, 2013:25). Selain permasalahan pangan, masalah lingkungan juga dapat terjadi karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian memicu masyarakat petani menjadikan hutan sebagai lahan pertanian baru, dimana kondisi ini bisa menimbulkan permasalahan seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan

fauna, banjir, kekeringan, dan bahkan perubahan lingkungan global.

Agroforestri adalah sistem budidaya yang menggabungkan tanaman hutan dengan pertanian. Menurut (Hairiah, *et.al.*, 2003:6) Agroforestri terdiri dari komponen-komponen kehutanan, pertanian dan atau peternakan, tetapi agroforestri sebagai suatu sistem mencakup komponen-komponen penyusun yang jauh lebih rumit. Pengembangan agroforestri tidak hanya terfokus pada teknik dan biofisik saja akan tetapi kebijakan pemerintah yang dibuat sebagai aturan dalam penggunaan sistem agroforestri juga sangat menentukan perkembangan agroforestri selanjutnya.

Provinsi Gorontalo sendiri memiliki kebijakan mengenai pertanian berkelanjutan yaitu peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam peraturan daerah tersebut belum ada kebijakan daerah yang sepenuhnya mengenai sistem agroforestri. Namun dari kebijakan pemerintah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sistem agroforestri bisa menjadi salah satu pilihan dalam menjalankan program sekaligus peraturan pemerintah ini.

Kecamatan Suwawa Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kecamatan Suwawa Selatan menjadi salah satu kecamatan yang sedang menjalankan program percepatan perhutanan sosial yaitu program hutan kemasyarakatan (HKM), dimana dua desa di kecamatan ini yaitu Desa Bonda Raya dan Desa Pancuran sudah masuk dalam blok pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah mengenai penggunaan lahan sistem agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dan melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah yang telah dibuat mengenai penggunaan lahan sistem agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Agroforestri

Menurut Hairiah, *et.al.*, (2004:5) menjelaskan bahwa sistem agroforestri merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, dengan mamadukan berbagai jenis pohon pada tingkat lahan (petak) pertanian maupun pada suatu bentang lahan (Lansekap).

Agroforestri di kembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforestri utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, dan dapat meningkatkan daya dukung ekologi manusia, khususnya di daerah pedesaan. Untuk daerah tropis, beberapa masalah (ekonomi dan ekologi) berikut menjadi mandat agroforestri dalam pemecahannya antara lain adalah menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan yang dijabarkan sebagai berikut: Meningkatkan persediaan pangan baik tahunan atau musiman dan perbaikan kualitas nutrisim, Diversifikasi produk dan pengurangan risiko gagal panen dan Keterjaminan bahan pangan secara berkesinambungan (von Maydell, 1986, dalam Mayrowani, *et.al.*, 2011:84).

Sistem penggunaan lahan dengan pola agroforestri pada hutan rakyat selain memiliki berbagai manfaat ekonomi langsung untuk masyarakat, juga memiliki manfaat jasa lingkungan seperti penyerapan karbon. Sistem agroforestri telah dikembangkan baik di negara berkembang maupun di negara maju untuk mengurangi laju emisi karbon (Nair, *et al.*, 2009:11).

Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Lahan

Dikutip dari Sore (2017:3) tentang kebijakan publik, Menurut Ealau dan Pewit 1973, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa dan sering kali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting tidak jarang, bagi sebagian orang

atau kelompok tertentu, kebijakan ditempatkan sedemikian penting, sehingga melupakan esensi dasarnya. Tarik menarik dalam perjuangan menyusun dan menetapkan kebijakan seolah lebih penting dari upaya lain yaitu bagaimana mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Biaya besar yang dikeluarkan untuk menyusun kebijakan adalah cerminan betapa pentingnya sebuah kebijakan dan sekaligus cerminan akan perlakuan berlebihan seolah hadirnya kebijakan lebih penting dari upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya. Memang perlakuan yang demikian dapat dimengerti karena tanpa kebijakan publik yang tepat, maka tujuan yang dikehendaki sulit dicapai. Namun sekali lagi harus proporsional karena sejatinya ia adalah sebuah alat, meskipun bukan alat yang biasa dalam mencapai sebuah tujuan organisasi (Rusli, 2013:9).

Konsep Dasar Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan sebuah keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil merupakan bentuk tranformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola oprasional, pada akhirnya menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah kebijakan diputuskan (Ali 2017:58).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango pada bulan Maret 2019. Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango menjadi lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki program percepatan perhutanan sosial, dan dari survei awal banyak ditemui lahan dengan sistem agroforestri.

Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data (Rianse dan Abdi, 2012: 61).

data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak dinas pertanian Kabupaten Bone Bolango dan serta para petani. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan. Sedangkan data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada (Rianse dan Abdi, 2012: 61). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu petani di Kecamatan Suwawa Selatan di dua desa yang sudah masuk blok pembebrdayaan program percepatan perhutanan sosial. Populasi yang di ambil berada di dua desa masing-masing di Desa Bonda Raya 80 orang dan di Desa Pancuran 80 orang, jadi total populasi berjumlah 160 orang. Selanjutnya dalam penarikan sampel menggunakan rumus slovin dengan persentase kesalahan 15% (0,15), maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 orang petani, dan masing-masing desa ditarik sebanyak 17 orang untuk desa pancuran sedangkan unruk desa bonda raya sebanyak 18 orang.

Tehnik Analisis Data

1. Analisis isi atau *content analysis*

Dalam penelitian analisis isi digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan dan peraturan perundangan, naskah akademik perundangan, buku, laporan hasil penelitian, prosiding (hasil diskusi, seminar, workshop, simposium), dan pemberitaan media. Dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan topik penelitian (sistem agroforestri). Tahapan analisis isi didahului dengan melakukan coding terhadap kata dan kalimat yang relevan dengan variabel yang diamati. Kemudian mengklasifikasi hasil coding berdasarkan satuan makna dan kategori (Bempah, 2014:23). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Lembaga /instansi	N o	Kebijakan dan program	Kriteria penggunaan lahan sistem agroforestri				
			Agr iSil viku tur	Ag ro pa str a	Sil vo pa stu ra	Agr o Silv opa s tura	Sil vo Fis her y

Gambar 1. Model analisis isi

Adapun penjelasan dari lima (5) kriteria penggunaan lahan sistem agroforestri adalah sebagai berikut:

1. Agrisilvikultur merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan (pepohonan, perdu, palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian.
 2. Agropastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan komponen peternakan.
 3. Silvopastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan.
 4. Agrosilvopastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan.
 5. Silvofishery merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan perikanan.
2. Skala Guttman

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni menggunakan Skala Guttman. Menurut Nasir 1998 dalam Suranto (2004 : 39) Skala Guttman merupakan skala kumulatif. Jika seseorang menginginkan pertanyaan atau pernyataan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan mengikatkan pertanyaan atau pernyataan yang kurang berbobot lainnya. Skala Guttman ingin mengukur satu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi, sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat unidimensional. Skala Guttman selain dapat di buat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam check list Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “ya” yang di peroleh dari kuesioner maka di hitung terlebih dahulu kemudian di tempatkan dalam rentang skala persentase sebagai berikut:

Rumus :

$$SG = \frac{X}{\sum S} \times 100$$

Dimana SG = Skala Guttman

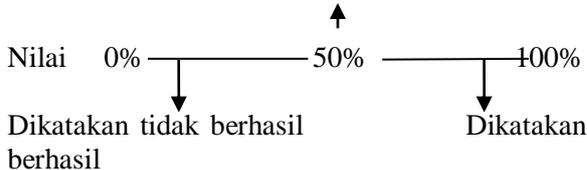
X = Rata-Rata Jawaban “Ya”

$\sum S$ = Total Sampel

Dari perhitungan menggunakan skala guttman tradisional menghasilkan persentase yang menentukan letak persentase pada rentang skala dengan berdasarkan indikator berikut:

Dikatakan mendekati tidak berhasil

Dikatakan mendekati berhasil



Bila persentase berada pada rentang skala 0% sampai 50% maka dikatakan tidak berhasil. Namun apabila persentase berada pada rentang skala 50% sampai 100% maka dikatakan berhasil. Dan apabila persentase berada tepat pada 50% maka dapat dikatakan mendekati tidak berhasil dan mendekati berhasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program dan Kebijakan Agroforestri di Kabupaten Bone Bolango

Di Kabupaten Bone Bolango sendiri ada beberapa instansi atau lembaga yang mengeluarkan kebijakan/program agroforestri baik itu instansi dinas kabupaten, dinas provinsi dan juga instansi pertikal yang terkait. di antaranya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango (BPDAS), Dinas Pertanian dan Peternakan Bone Bolango, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, serta bagian hukum Kabupaten Bone Bolango. Program dan kebijakan dari setiap instansi tidak semua secara langsung terkait dengan kegiatan agroforestri. Program dan kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang secara langsung terkait sebanyak 9 program dan kebijakan terdiri dari 2 kebijakan dan 7 program yang dikeluarkan oleh empat instansi pemerintah baik Dinas Kabupaten Bone Bolango, Dinas Provinsi Gorontalo, dan instansi pertikal yang terkait. Sedangkan program dan kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang secara tidak langsung terkait dengan penggunaan lahan sistem agroforestri sebanyak 9 program dan kebijakan terdiri dari 2 kebijakan dan 7 program yang dikeluarkan oleh dua instansi pemerintah baik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Implementasi Program dan Kebijakan Agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango

Implementasi program dan kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan setelah program atau kebijakan di putuskan dan dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi. Implementasi atau pelaksanaan program dan kebijakan adalah kegiatan yang terstruktur dan bertahap yang tiap tahapannya harus dilalui secara teratur dan sesuai alir tahapan agar bisa menuai keberhasilan. Sama halnya dengan implementasi program dan kebijakan penggunaan lahan dengan sistem agroforestri yang memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Berikut tahapan-tahapan agroforestri:

1. Penyediaan bibit

Penyediaan bibit meliputi pembuatan dan atau pengadaan bibit yang dapat dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat/badan usaha/perusahaan/UPT lingkup Direktorat Jenderal PDASHL. Bibit yang disediakan adalah bibit-bibit dengan jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi agroklimat setempat, dan budaya lokal

a. Asal-usul bibit tanaman hutan :

Bibit berkualitas diperoleh dari benih berkualitas yang berasal dari sumber benih bersertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Sumber benih yang bersertifikat memiliki klasifikasi sebagai berikut:

1. Tegakan benih teridentifikasi;
2. Tegakan benih terseleksi;
3. Areal produksi benih;
4. Tegakan benih provenans;
5. Kebun benih semai;
6. Kebun benih klon;
7. Kebun pangkas.

b. Kriteria dan standar serta sertifikasi mutu bibit

Kriteria dan standar mutu bibit ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya kualitas, penanganan/perlakuan benih, teknik pembibitan, dan tujuan penggunaannya. Mutu bibit dinyatakan dalam bentuk sertifikat mutu bibit (berasal dari sumber benih bersertifikat) dan surat keterangan mutu bibit (bukan berasal dari sumber benih bersertifikat).

2. Penyiapan kelembagaan

Penyiapan kelembagaan masyarakat dilakukan antara lain dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan
- b. Penyiapan lahan untuk lokasi kegiatan agroforestri
- c. Pertemuan-pertemuan kelompok tani/masyarakat
- d. Penyiapan administrasi kelompok tani/masyarakat
- e. Penyusunan perangkat aturan/kesepakatan internal kelompok tani

3. Penanaman

a. Persiapan penanaman

Persiapan penanaman dilaksanakan melalui tahapan, yaitu :

1. Penataan areal penanaman sesuai dengan pola agroforestri yang akan diterapkan.

Kegiatan penataan areal penanaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan
- b. Penentuan arah larikan
- c. Penentuan tempat penampungan sementara bibit yang akan ditanam

2. Pembuatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dibangun untuk kelancaran kegiatan agroforestri meliputi :

- a. Pembuatan gubuk kerja dan papan pengenal di lapangan.
- b. Pembuatan jalan inspeksi/setapak dan atau jembatan di dalam lokasi agroforestri jika diperlukan.

b. Pelaksanaan penanaman

Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan dan pada lubang tanam atau larikan yang telah disiapkan. Kegiatan penanaman dilakukan sesuai dengan tipe agroforestri dan jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan.

4. Pengendalian dan evaluasi

Kegiatan pengendalian yang dilakukan meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengendalian (monitoring) ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan agroforestri sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan agroforestri yang telah dilaksanakan. Adapun tujuannya adalah teridentifikasinya kondisi fisik tanaman agroforestri sebagai dasar pengelolaan lahan selanjutnya.

Program agroforestri yang dijalankan petani di Kecamatan Suwawa Selatan adalah program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Sedangkan dari Balai Pengelolaa Daerah Aliran Sungai Bone Bolango BPDAS dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango belum ada implementasi program dan kebijakan di Kecamatan Suwawa Selatan terkait agroforestri. BPDAS sendiri belum ada implementasi program dan kebijakan pemerintah tentang penggunaan lahan sistem agroforestri di Kabupaten Bone Bolango lebih khusus di Kecamatan Suwawa Selatan dikarenakan BPDAS baru mengimplementasikan program di Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2015. Dan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango, program agroforestri dalam hal ini sistem pertanian terpadu (SPT) penerapannya atau pelaksanaan belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, program ini baru di laksanakan di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Bulango Timur, selain dua

kecamatan ini belum ada implementasi program sistem pertanian terpadu (SPT). Hal ini dikarenakan program ini masi dalam tahapan uji coba.

Untuk melihat keberhasilan implementasi program dan kebijakan sistem agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan yaitu dengan melihat 3 elemen implementasi program dan kebijakan yang harus dipenuhi, yakni program dan kebijakan, lembaga atau organisasi, dan pemanfaat atau petani. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 1.

Kondisi Program dan Kebijakan Agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, 2019

Program dan Kebijakan		
Item Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan sistem agroforestri?	35	0
Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan yang mengkombinasi antara kegiatan pertanian dan peternakan?	34	1
Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan yang mengkombinasi antara komponen kehutanan dan peternakan?	22	13
Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan yang menggabungkan antara kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan?	26	9
Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan yang menggabungkan antara komponen kehutanan dan perikanan?	5	30
Total	122	53
Rata-Rata	24,40	10,60

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Bedasarkan Tabel 1, dapat dilihat dari hasil analisis data sebanyak 35 responden dengan total jawaban "ya" 122 dan rata-rata jawaban "ya" 24,40 dari 5 pertanyaan dalam kuesioner. Petani di Kecamtan Suwawa Selatan sebnyak 35 responden dari 5 pertanyaan yang menjawab "ya" pada pertanyaan pertama yakni "apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang menggabungkan antara tanaman pertanian dengan tanaman hutan berupa pepohonan dalam

satu lahan budidaya?"; jawaban responden terkait pertanyaan ini sesuai dengan program pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Gorontalo tentang pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan perhutanan sosial yang hingga saat ini masi berjalan. Sedangkan untuk jawaban "ya" paling sedikit pada pertanyaan ke lima yakni "Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang menggabungkan antara komponen kehutanan dengan perikanan dalam satu lahan budidaya". Hal ini dikarenakan kegiatan program pemerintah terkait agroforestri lebih memungkinkan untuk jenis agroforestri kombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian (agrisilvikultur), kombinasi kegiatan kehutanan dan peternakan (silvopastura), dan kombinasi kegiatan kehutana, peternakan serta pertanian (agrosilvopastura), dibandingkan dengan agroforestri kombinasi kegiatan kehutanan dan perikanan (silvofishery).

Tabel 2.

Kondisi Lembaga atau Organisasi Implementasi Agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, 2019

Lembaga atau Organisasi		
Item Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah dalam sosialisasi yang dilakukan penyuluh program berbasis agroforestri memiliki perencanaan yang baik?	35	0
Apakah dalam pengimplementasian program, penyuluh/lembaga menyediakan fasilitas untuk menunjang keberhasilan program pertanian berbasis agroforestri?	23	12
Apakah dalam sosialisasi program SDM dari penyuluh di lihat mampu mensukseskan program berbasis agroforstri?	35	0
Apakan penyuluh menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program pertanian berbasis agroforestri?	24	11
Apakah ada hubungan dari lembaga yang mengadakan program dengan lembaga pendukung lain??	11	24
Total	128	47
Rata-Rata	25,60	94,40

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Bedasarkan Tabel 2, dapat dilihat dari hasil analisis data sebanyak 35 responden dengan total jawaban "ya" 128 dan rata-rata jawaban "ya" 25,60 dari 5 pertanyaan dalam kuesioner. Petani responden di Kecamatan Suwawa Selatan pada dua pertanyaan yakni pertanyaan pertama dan pertanyaan ke tiga. Dimana pertanyaan pertama berisikan "Apakah dalam sosialisasi yang dilakukan penyuluh/lembaga mengenai program

penggunaan lahan ramah lingkungan dalam hal ini pertanian berbasis agroforestri memiliki perencanaan yang baik?”, dan pertanyaan ke tiga “Apakah dalam sosialisasi program, sumber daya manusia dari penyuluh/lembaga di lihat mampu mensukseskan program pertanian berbasis agroforestri?”. Dilihat dari dari jawaban responden mengenai pertanyaan pertama sesuai dengan program pemerintah yakni pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan perhutanan sosial dimana dilamnya terdapat agroforestri. Untuk jawaban responden pada pertanyaan ketiga sesuai dengan fakta dilapangan bahwa program sedang berjalan dengan baik hal ini tidak lepas dari peran penyuluh. Sedangkan pertanyaan yang paling sedikit jawaban “ya” dari petani responden yakni pertanyaan ke lima “Apakah ada hubungan/relasi dari lembaga yang mengadakan program dengan lembaga pendukung lain seperti lembaga yang bisa menyediakan anggaran/biaya maupun fasilitas?”. Hal ini terjadi karena ketidak terbukaan penyuluh kepada petani mengenai anggaran program yang akan dijalankan.

Tabel 3.

Kondisi Pemanfaat atau Petani Implementasi agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, 2019

Pemanfaat atau Petani		
Item Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri mampu meningkatkan perekonomian petani?	35	0
Apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri berpengaruh positif terhadap kondisi sosial petani?	35	0
Apakah penggunaan lahan sistem agroforestri bermanfaat pada lingkungan?	33	2
Apakah pengelolaan lahan menggunakan sistem agroforestri dapat mengurangi penggunaan pupuk organik maupun kimia?	30	5
Apakah dengan pengelolaan lahan menggunakan sistem agroforestri menghasilkan berbagai macam output produksi?	34	1
Total	168	7
Rata-Rata	33,60	1,40

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3, dilihat dari hasil analisis data sebanyak 35 responden dengan total jawaban "ya" 168 dan rata-rata jawaban "ya" 33,60 dari 5 pertanyaan dalam kuesioner. Petani responden di Kecamatan Suwawa Selatan sebanyak 35 responden menjawab “ya” pada dua pertanyaan yakni pertanyaan pertama dan pertanyaan ke dua. Dimana pertanyaan pertama berisikan “Menurut saudara

apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri mampu meningkatkan perekonomian petani?”, dan pertanyaan ke dua “Menurut saudara apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri berpengaruh positif terhadap kondisi sosial petani?”. Dilihat dari jawaban responden mengenai pertanyaan pertama dengan kondisi lahan pertanian di Kecamatan Suwawa Selatan yang tidak hanya berisikan satu jenis komponen budidaya melainkan lebih, Pada lahan pertanian di Kecamatan Suwawa Selatan kita bisa menemukan komponen pertanian dan kehutanan dalam satu kawasan budidaya, bahkan kita bisa menemukan tiga komponene budidaya dalam satu kawasan budidaya. Hal ini menandakan pertanian berbasis agroforestri lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan untuk jawaban pertanyaan kedua tentang pengaruh positif agroforestri pada kondisi sosial petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini terjadi karena agroforestri adalah teknik budidaya ramah lingkungan yang sifatnya berkelanjutan, sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi lingkungan dan bahkan akan memperbaiki kerusakan lingkungan. Kemudian dari segi ekonomi agroforestri bisa menghasilkan produksi yang beragam jenis baik dari hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan dan bahkan perikanan, sehingga peluang terciptanya lapangan kerja lebih besar.

Tabel 4.

Rekapitulasi Elemen Implementasi Program dan Kebijakan yang Menjawab “Ya” Tentang Penggunaan Lahan Sistem Agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan, 2019

Elemen Implementasi Program dan Kebijakan	Total Jawaban Ya	Rata-Rata Jawaban Ya
Program dan Kebijakan	122	24,40
Lembaga atau Organisasi	128	25,60
Pemanfaat atau Petani	168	33,60

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat rekapitulasi elemen implementasi program dan kebijakan di Kecamatan Suwawa Selatan yang di peroleh dari 35 petani responden melalui kuesioner, yang diolah menggunakan Skala Guttman Tradisional untuk menentukan persentase tiap elemen implementasi program dan kebijakan. Hasil analisis diperoleh sebagai berikut:

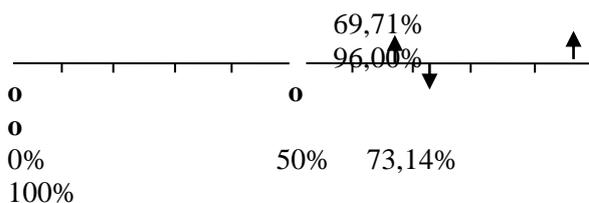
Tabel 5
Nilai Skala Guttman Jawaban Ya

No	Elemen Implementasi Program dan Kebijakan	Rata-Rata Jawaban Ya (X)	Total Sampel (ΣS)	100%	Nilai SG(%)
1	Program dan Kebijakan	24,40	35	100	69,71
2	Lembaga atau Organisasi	25,60	35	100	73,14
3	Pemanfaat atau Petani	33,60	35	100	96,00

Sumber: data primer yang diolah 2019

Dari Tabel 5, memperlihatkan persentase tiap elemen implementasi yakni: untuk program dan kebijakan dilihat dari perhitungan antara 24,40 dikali dengan 100% dan dibagi 35 menghasilkan persentase sebesar 69,71%, lembaga atau organisasi dilihat dari perhitungan antara 25,60 dikali dengan 100% dan dibagi 35 menghasilkan persentase sebesar 73,14%, dan pemanfaat atau petani dilihat dari perhitungan antara 33,60 dikali dengan 100% dan dibagi 35 menghasilkan persentase sebesar 96,00%. Dari hasil persentase tiap elemen sudah bisa menentukan posisi rentang skala dan indikator dari tiap elemen.

Rentang skala elemen implementasi program dan kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri adalah sebagai berikut:



Dari hasil diatas maka ketiga elemen Implementasi Program dan Kebijakan Agroforestri berada pada rentang 50%-100% dengan kategori elemen dikatakan berhasil apabila mendekati nilai 100%. Hasil ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Program dan Kebijakan dengan nilai 69,71% hasil ini dikatakan berhasil. Dimana dari total responden 35 orang yang menjawab “ya” sebanyak 24 orang dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang paling banyak mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan sistem agroforestri?”, sedangkan pertanyaan yang paling sedikit

- mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah ada program dari pemerintah daerah tentang penggunaan lahan yang menggabungkan antara komponen kehutanan dan perikanan?”
- Lembaga atau Organisasi dengan nilai 73,14% hasil ini dikatakan berhasil. Dimana dari total responden 35 orang yang menjawab “ya” sebanyak 25 orang dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang paling banyak mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah dalam sosialisasi yang dilakukan penyuluh program berbasis agroforestri memiliki perencanaan yang baik?” dan “Apakah dalam sosialisasi program SDM dari penyuluh di lihat mampu mensukseskan program berbasis agroforestri?”, sedangkan pertanyaan yang paling sedikit mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah ada hubungan dari lembaga yang mengadakan program dengan lembaga pendukung lain?”. Persentase ini lebih besar dari pada persentase yang di peroleh program dan kebijakan yang hanya 69,71%. Hal ini di karenakan pada lembaga atau organisasi dalam hal ini adalah penyuluh berhasil melaksanakan tugasnya dilihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan yang ada. Dimana pertanyaan-pertanyaan mengandung perencanaan program, penyediaan fasilitas, sumber daya manusia dari penyuluh, penyediaan anggaran sudah terlaksana dalam proses implementasi melalui sosialisasi penyuluh.
- Pemanfaat atau Petani dengan nilai 96,00% hasil ini dikatakan berhasil. Dimana dari total responden 35 orang yang menjawab “ya” sebanyak 33 orang dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang paling banyak mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri mampu meningkatkan perekonomian petani?” dan “Apakah penggunaan lahan dengan sistem agroforestri berpengaruh positif terhadap kondisi sosial petani?”, sedangkan pertanyaan yang paling sedikit mendapatkan jawaban “ya” yakni “Apakah pengelolaan lahan menggunakan sistem agroforestri dapat mengurangi penggunaan pupuk organik maupun kimia?”. Persentase ini lebih besar dari elemen implementasi lain yakni program dan kebijakan sebesar 69,71%, serta lembaga atau organisasi

sebesar 73,14%. Hal ini di karenakan petani menerima keuntungan dari program agroforestri baik itu keuntungan segi ekonomi petani secara kusus dan masyarakat luas, sosial petani secara kusus dan masyarakat luas pada umumnya, serta lingkungan pertanian dan lingkungan di kawasan pertanian, sebagaimana prinsip agroforestri.

Berdasarkan hasil persentase dan letak rentang skala atau skala rasio dari setiap elemen implementasi dan kategori yang diperoleh setiap elemen. Maka Implementasi Program dan Kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan mengalami keberhasilan.

KESIMPULAN

1. Kabupaten Bone Bolango memiliki program dan kebijakan tentang penggunaan lahan sistem agroforestri yang dikeluarkan oleh 4 instansi atau lembaga pemerintah yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Pertanian Bone Bolango, Bagian Hukum Bone Bolango, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program dan kebijakan berjumlah 18 yang terdiri dari 9 program dan kebijakan yang secara langsung terkait dengan sistem agroforestri dan 9 program dan kebijakan yang secara tidak langsung terkait dengan sistem agroforestri.
2. Hasil penelitian tentang Implementasi program dan kebijakan agroforestri di Kecamatan Suwawa Selatan berada pada kategori berhasil dilihat dari 3 elemen implementasi, yakni program atau kebijakan sebanyak 69,71%, lembaga atau organisasi 73,14%, dan pemanfaat atau petani 96,00% yang berada pada rentang skala 50%-100% dengan kategori berhasil. Program agroforestri yang di jalankan petani di Kecamatan Suwawa Selatan adalah program yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Prespektif Governance di Indonesia*. Penerbit UB Pres. Malang.

- Bempah, Irwan. 2014. Model Implementasi Kebijakan Wisata Alam di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Provinsi Gorontalo. *Disertasi*. Sekolah Pasca sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hairiah, Kurniatun. Mustofa Agung Sardjono dan Sambas Sabarnurdin. 2003. Pengantar Agroforestri. *Jurnal*. Maret 2003. World Agroforstry Centre (ICRAF). Bogor.
- Hairiah, Kurniatun. Widiyanto. Didik Suprayogo. Rudi Harto Widodo. Pratiknyo Purnomosidhi. Subekti Rahayu dan Meine van Noordwijk. 2004. *Ketebalan seresah sebagai indikator daerah aliran sungai (DAS) sehat*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Kaputra, Iswan. 2013. Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. *Jurnal*. Strukturasi Vol.1 No.1 : 25-39. Juli 2013. Pascasarjana. Antropologi Sosial. Universitas Negeri Medan. Sumatra Utara.
- Mayrowani, Henny. Ashari. 2011. Perkembangan Agroforestri Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. Forum penelitian agro ekonomi. Vol.29 No.2 : 83-98. Juli 2011. *Jurnal*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Nair, P K Ramachandran. B Mohan Kumar. Nair Vimala D. 2009. Agroforestri sebagai Strategi untuk Penyerapan Karbon. Vol. 172 : 10-23. *Jurnal* Nutrisi Tumbuhan dan Ilmu Tanah. J. Plant Nutr. Sci Tanah. University of Florida.
- Riense, Usman dan Abdi. 2010. *Agroforstri Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Huta*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Sore, Udin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Penerbit CV MEDIA. Makasar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Suranto. M, Musrofi. Agung Widodo. 2004. Analisis Kepuasan Konsumen Dengan Skala Guttman. *Jurnal*. Ilmiah Teknik Industri Vol. 03 No. 02 : 39. Desember 2004. Laboratorium Statistika dan Penelitian Operasional Teknik Industri. Universitas Muhammadiyah Surakarta.